



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 3682-3696

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Strategi Pengembangan Bisnis Nelayan Melalui Optimalisasi Bumdes Guna Peningkatan Pendapatan Desa

Lalu Muhammad Syahril Majidi, Endah Tri Wahyuningtyas, Binti Laelatul Magfuroh
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
endahtri@unusa.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat nelayan Desa Kaduara Timur, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, mengenai strategi pengembangan bisnis nelayan melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Permasalahan utama mitra adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan lokal karena usaha nelayan masih cenderung berjalan secara individual, belum terintegrasi dalam kelembagaan ekonomi desa, serta masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi BUMDes, kerja sama usaha, pengelolaan keuangan, akuntansi sederhana, dan pengawasan usaha. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya nilai tambah hasil perikanan dan belum maksimalnya kontribusi sektor nelayan terhadap peningkatan pendapatan desa. Kegiatan dilaksanakan secara luring melalui ceramah interaktif, diskusi, brainstorming, pre-test, post-test, evaluasi, dan pendampingan lanjutan. Materi pelatihan mencakup pentingnya berserikat, konsep syirkah, definisi dan landasan hukum BUMDes, strategi membangun BUMDes yang sehat, pengembangan bisnis nelayan, pencatatan keuangan, transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan usaha desa. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator. Pemahaman tentang pentingnya berserikat meningkat dari 55,7 menjadi 87,3; definisi BUMDes dari 83,5 menjadi 95,7; landasan hukum BUMDes dari 45,4 menjadi 92,6; langkah membangun BUMDes sehat dari 35,7 menjadi 87,3; dan peran akuntansi dari 75,8 menjadi 90,5. Dengan demikian, kegiatan ini efektif meningkatkan literasi masyarakat nelayan dan mendorong BUMDes sebagai instrumen strategis penguatan ekonomi lokal, peningkatan nilai tambah produk perikanan, perluasan kerja sama usaha, serta peningkatan pendapatan desa secara berkelanjutan.

Kata kunci: Strategi Bisnis, Desa Kaduara Timur, Sumenep, Nelayan, BUMDes, Syirkah, Akuntansi Pertanggungjawaban dan Pengawasan.

1. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan sarana pemerintah desa dan masyarakat dalam mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Keberadaan BUMDes bertujuan untuk menstimulasi perekonomian desa, mengembangkan potensi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat pendapatan asli desa. Secara konseptual, BUMDes berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang dibentuk untuk mengelola usaha, aset, jasa pelayanan, dan potensi ekonomi lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa (UPDESA, n.d.). Peran BUMDes juga semakin penting dalam mendukung kemandirian ekonomi desa karena lembaga ini dapat menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat berbasis potensi lokal (Amirya, 2024).

Penguatan BUMDes sejalan dengan semangat otonomi desa. Desa tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan dalam mengatur, mengelola, dan mengembangkan potensi sosial-ekonomi masyarakatnya. Suwaryo (2011) menjelaskan bahwa otonomi desa perlu dikembalikan agar desa memiliki ruang untuk mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan karakteristik dan potensi lokal. Dalam konteks pembangunan ekonomi, penguatan kelembagaan desa menjadi penting karena pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan, kemandirian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Arsyad, 2016).

Dalam konteks Desa Kaduara Timur, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, potensi ekonomi lokal yang menonjol adalah sektor perikanan tangkap tradisional. Sebagian masyarakat desa menggantungkan pendapatan pada aktivitas nelayan, baik melalui penangkapan ikan secara langsung maupun pengolahan hasil perikanan oleh

rumah tangga. Sektor perikanan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, terutama karena aktivitas perikanan menjadi sumber utama penghidupan bagi banyak rumah tangga nelayan (Food and Agriculture Organization, 2020). Kurniawati (2017) juga menjelaskan bahwa pendapatan keluarga nelayan tidak hanya bergantung pada aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga dapat diperkuat melalui peran rumah tangga, termasuk pengolahan hasil perikanan sebagai sumber tambahan pendapatan.

Namun demikian, potensi perikanan di Desa Kaduara Timur belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa. Hasil telaah awal menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai fungsi, manfaat, dan mekanisme pengelolaan BUMDes. Nelayan dan pelaku usaha rumah tangga berbasis hasil perikanan masih cenderung menjalankan usaha secara individual, belum terintegrasi dalam model bisnis kolektif yang mampu memperkuat posisi tawar, memperluas akses pasar, meningkatkan nilai tambah produk, dan menciptakan keberlanjutan usaha. Padahal, pengembangan usaha berbasis kebutuhan masyarakat dan potensi lokal dapat menjadi strategi penting dalam memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat apabila dikelola secara terarah dan berkelanjutan (Fauzi, n.d.).

Kesenjangan utama yang ditemukan adalah belum optimalnya hubungan antara potensi perikanan desa dengan peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal. Di satu sisi, Desa Kaduara Timur memiliki sumber daya perikanan dan aktivitas usaha masyarakat yang dapat dikembangkan. Di sisi lain, masyarakat belum sepenuhnya memahami bagaimana BUMDes dapat menjadi wadah kerja sama usaha, pengelolaan produk, pemasaran, pencatatan keuangan, dan pengawasan usaha secara transparan. Kondisi ini menyebabkan peluang peningkatan pendapatan desa melalui penguatan usaha nelayan belum berjalan secara maksimal.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena BUMDes memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa apabila dikelola secara efektif. Ismowati, Fadhila, dan Firmansyah (2022) menunjukkan bahwa BUMDes dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal. Hal ini juga didukung oleh Susanto dan Winarno (2020), yang menjelaskan bahwa BUMDes dapat berkontribusi terhadap penguatan ekonomi pedesaan apabila memiliki tata kelola, program usaha, dan dukungan kelembagaan yang baik. World Bank (2020) juga menekankan pentingnya penguatan peran BUMDes di Indonesia agar lembaga ini tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi juga mampu mendukung pengembangan ekonomi lokal secara nyata.

Urgensi kegiatan pengabdian ini terletak pada kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha berbasis hasil perikanan, dalam memahami strategi pengembangan bisnis melalui optimalisasi BUMDes. Tanpa adanya pendampingan, potensi desa berisiko tetap dikelola secara tradisional, tidak terdokumentasi dengan baik, serta belum mampu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat maupun pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendampingan yang tidak hanya berfokus pada pengenalan BUMDes, tetapi juga pada strategi bisnis, kerja sama usaha, tata kelola keuangan, akuntansi sederhana, dan mekanisme pengawasan.

Strategi pengembangan bisnis nelayan melalui BUMDes perlu dirancang secara sistematis agar potensi lokal dapat dikelola menjadi kegiatan usaha yang produktif. Strategi pengembangan sumber daya dan usaha menjadi penting karena keberhasilan organisasi atau lembaga ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam merancang strategi, mengelola sumber daya, serta meningkatkan kinerja secara berkelanjutan (Juliansyah, 2017). Dalam konteks ini, BUMDes dapat berperan sebagai lembaga yang memfasilitasi pengembangan usaha nelayan, memperkuat jaringan pemasaran, mengelola produk unggulan, serta membantu masyarakat meningkatkan nilai tambah dari hasil perikanan.

Selain strategi bisnis, aspek akuntansi dan pengawasan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan BUMDes. Akuntansi diperlukan untuk mencatat transaksi, mengukur kinerja usaha, menyusun laporan keuangan sederhana, serta memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Rajafi dan Irianto (2007) menegaskan bahwa akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga dapat mendukung pertanggungjawaban dan transparansi dalam aktivitas organisasi. Dalam konteks BUMDes, akuntansi dapat membantu pengelola mengetahui pemasukan, pengeluaran, keuntungan, perkembangan usaha, dan kontribusi usaha terhadap pendapatan desa.

Pengawasan diperlukan agar kegiatan usaha yang dijalankan melalui BUMDes dapat berjalan sesuai tujuan, menghindari penyimpangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ekonomi desa. Dalam

pengembangan bisnis nelayan, pengawasan yang baik dapat memastikan bahwa kerja sama antara nelayan, pelaku usaha rumah tangga, dan BUMDes berjalan secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, strategi bisnis, akuntansi, dan pengawasan memiliki keterkaitan langsung dalam mendorong peningkatan pendapatan nelayan dan pendapatan desa.

Strategi pengembangan bisnis nelayan melalui BUMDes juga dapat diarahkan melalui model kerja sama atau syirkah. Syirkah merupakan bentuk kerja sama usaha dalam perspektif bisnis Islam yang menekankan prinsip kebersamaan, pembagian keuntungan, dan pembagian risiko sesuai kesepakatan (Accurate, n.d.). Melalui model ini, nelayan dan masyarakat desa dapat membangun usaha bersama berbasis potensi lokal, sedangkan BUMDes berperan sebagai lembaga yang mengelola, memfasilitasi, dan mengawasi kegiatan usaha tersebut. Dengan demikian, strategi bisnis nelayan tidak hanya diarahkan pada peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga pada penguatan kelembagaan usaha, peningkatan nilai tambah produk, pencatatan keuangan, dan perluasan akses pasar.

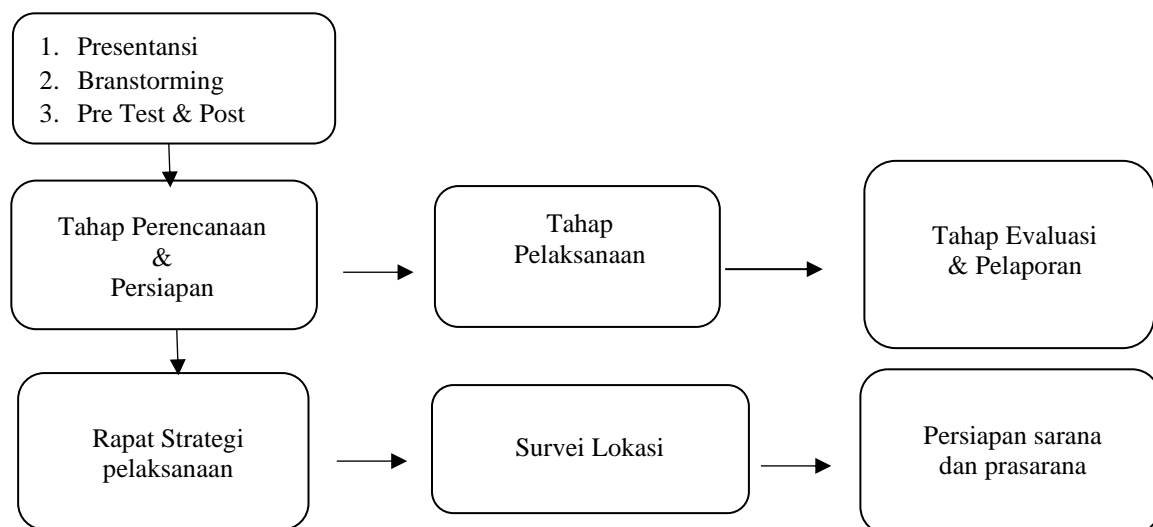
Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai strategi pengembangan bisnis nelayan melalui optimalisasi BUMDes. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya kerja sama usaha, pencatatan keuangan, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan BUMDes. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan mampu memahami bahwa BUMDes bukan hanya lembaga administratif desa, tetapi juga instrumen strategis untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan nelayan, memperkuat usaha rumah tangga berbasis hasil perikanan, serta mendukung peningkatan pendapatan desa secara berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara tatap muka langsung di Desa Kaduara Timur, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep. Metode pelaksanaan kegiatan dirancang untuk menjawab permasalahan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai strategi pengembangan bisnis nelayan melalui optimalisasi BUMDes, tata kelola keuangan, akuntansi sederhana, serta pengawasan dalam peningkatan pendapatan desa. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi, ceramah interaktif, diskusi/brainstorming, pre-test, post-test, evaluasi, dan pendampingan lanjutan.

2.1 Subjek Kegiatan

Subjek kegiatan pengabdian ini adalah warga Desa Kaduara Timur yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi berbasis perikanan dan pengembangan BUMDes. Peserta kegiatan terdiri atas nelayan, pelaku usaha rumah tangga berbasis hasil perikanan, perangkat desa, calon/pengelola BUMDes, serta masyarakat yang memiliki minat dalam pengembangan usaha desa. Jumlah peserta kegiatan sebanyak 35 orang. Pemilihan peserta dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi desa, potensi usaha perikanan, serta kebutuhan peningkatan pemahaman mengenai BUMDes, strategi bisnis, akuntansi, dan pengawasan usaha desa.



Gambar 1. Alur Metode Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

2.2 Tahap Perencanaan dan Persiapan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Tahap persiapan dan identifikasi masalah.
Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan koordinasi awal dengan pemerintah desa dan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai kondisi masyarakat, potensi perikanan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan BUMDes. Tim juga melakukan survei lokasi, menyusun jadwal kegiatan, menyiapkan materi pelatihan, menyusun instrumen pre-test dan post-test, serta mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan.
2. Tahap pelaksanaan pre-test.
Sebelum penyampaian materi, peserta diberikan pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mengenai BUMDes, pentingnya kerja sama usaha, strategi pengembangan bisnis nelayan, akuntansi sederhana, dan pengawasan BUMDes. Pre-test digunakan sebagai dasar untuk mengukur perubahan pemahaman peserta setelah kegiatan dilaksanakan.
3. Tahap penyampaian materi pelatihan.
Pada tahap ini, tim pelaksana memberikan materi melalui ceramah interaktif dan diskusi. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami agar peserta dapat mengaitkan materi dengan kondisi usaha nelayan dan potensi ekonomi Desa Kaduara Timur. Peserta juga diberikan contoh sederhana mengenai bagaimana BUMDes dapat menjadi wadah pengembangan usaha bersama, pengolahan produk hasil perikanan, pencatatan keuangan, dan pengawasan kegiatan usaha.
4. Tahap diskusi dan brainstorming.
Setelah materi disampaikan, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, kendala, dan gagasan terkait pengembangan usaha nelayan melalui BUMDes. Brainstorming dilakukan untuk menggali permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat, seperti kendala pemasaran hasil ikan, pengolahan produk, pencatatan keuangan, kerja sama usaha, serta kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Hasil diskusi digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi pengembangan usaha desa.
5. Tahap post-test dan evaluasi kegiatan.
Setelah kegiatan pelatihan dan diskusi selesai, peserta diberikan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman setelah menerima materi. Selain itu, peserta juga mengisi kuesioner evaluasi untuk mengetahui tingkat ketertarikan, pemahaman, dan kesiapan mereka dalam menindaklanjuti pengembangan bisnis nelayan melalui BUMDes.
6. Tahap pendampingan lanjutan.
Pendampingan lanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa hasil kegiatan tidak berhenti pada peningkatan pemahaman, tetapi dapat diarahkan pada tindak lanjut praktis. Pendampingan ini meliputi penyusunan rencana awal pengembangan usaha nelayan melalui BUMDes, pengenalan pencatatan keuangan sederhana, identifikasi produk unggulan berbasis hasil perikanan, serta penyusunan rekomendasi pengawasan usaha BUMDes agar lebih transparan dan akuntabel.

2.3 Materi Pelatihan

Materi pelatihan disusun sesuai dengan kebutuhan mitra dan permasalahan yang ditemukan di Desa Kaduara Timur. Materi yang diberikan meliputi:

1. pengertian, fungsi, tujuan, dan manfaat BUMDes bagi masyarakat desa;
2. pentingnya berserikat atau bekerja sama dalam pengembangan usaha nelayan;
3. konsep syirkah sebagai model kerja sama usaha yang menekankan pembagian keuntungan dan risiko secara adil;
4. landasan hukum dan kelembagaan BUMDes;
5. strategi pengembangan bisnis nelayan melalui BUMDes;
6. penguatan nilai tambah produk hasil perikanan;
7. pencatatan keuangan dan akuntansi sederhana bagi BUMDes;

8. pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan BUMDes;
9. penyusunan rencana tindak lanjut pengembangan usaha nelayan berbasis potensi lokal.

2.4 Instrumen Evaluasi

Instrumen evaluasi yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri atas pre-test, post-test, kuesioner tanggapan peserta, lembar observasi, dan catatan hasil diskusi. Pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Kuesioner tanggapan peserta digunakan untuk mengetahui tingkat ketertarikan, penerimaan materi, dan kesiapan peserta dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Lembar observasi digunakan oleh tim pelaksana untuk mencatat partisipasi peserta selama kegiatan, sedangkan catatan hasil diskusi digunakan untuk merangkum permasalahan, potensi, dan usulan tindak lanjut dari masyarakat.

Aspek yang diukur dalam instrumen evaluasi meliputi pemahaman peserta mengenai pentingnya berserikat, definisi BUMDes, landasan hukum BUMDes, langkah-langkah membangun BUMDes yang sehat, strategi pengembangan bisnis nelayan, serta peran akuntansi dan pengawasan dalam mendukung keberhasilan BUMDes.

2.5 Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur melalui beberapa indikator.

1. Adanya peningkatan pemahaman peserta yang ditunjukkan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test.
2. Meningkatnya ketertarikan peserta terhadap pengembangan bisnis nelayan melalui BUMDes.
3. Peserta mampu memahami fungsi BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang dapat mengelola potensi perikanan lokal.
4. Peserta memahami pentingnya pencatatan keuangan sederhana dan pengawasan dalam mendukung transparansi serta akuntabilitas BUMDes.
5. Tersusunnya rekomendasi awal atau rencana tindak lanjut pengembangan usaha nelayan melalui BUMDes.

Kegiatan dinyatakan berhasil apabila terdapat peningkatan skor pemahaman peserta setelah kegiatan, peserta aktif dalam diskusi, serta muncul komitmen awal dari masyarakat dan pihak desa untuk menindaklanjuti pengembangan usaha nelayan berbasis BUMDes.

2.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari pre-test, post-test, dan kuesioner dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan persentase atau rata-rata tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil pre-test digunakan untuk menggambarkan kondisi awal pemahaman peserta, sedangkan hasil post-test digunakan untuk mengetahui peningkatan pemahaman setelah pelatihan.

Selain itu, data dari diskusi, brainstorming, observasi, dan catatan lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan respons peserta, kendala yang dihadapi masyarakat, potensi pengembangan usaha nelayan, serta rekomendasi tindak lanjut bagi penguatan BUMDes. Dengan demikian, analisis data tidak hanya menunjukkan perubahan pemahaman peserta secara angka, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kebutuhan nyata masyarakat dalam pengembangan bisnis nelayan melalui BUMDes.

2.7 Pendampingan Lanjutan

Pendampingan lanjutan dilakukan sebagai bentuk keberlanjutan kegiatan pengabdian. Pendampingan ini diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat dan pengelola BUMDes dalam merancang strategi usaha berbasis potensi perikanan. Bentuk pendampingan meliputi identifikasi produk unggulan desa, penyusunan rencana bisnis sederhana, pengenalan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penyusunan laporan keuangan sederhana, serta pemberian arahan mengenai mekanisme pengawasan usaha.

Melalui pendampingan lanjutan, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami konsep BUMDes secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kegiatan ekonomi desa. Pendampingan ini juga diharapkan

dapat mendorong terbentuknya model pengembangan bisnis nelayan yang lebih terarah, transparan, akuntabel, dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta pendapatan desa.

3. Hasil dan Diskusi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai strategi pengembangan bisnis nelayan melalui optimalisasi BUMDes di Desa Kaduara Timur menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah kegiatan dilaksanakan. Peningkatan tersebut diukur melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test yang diberikan kepada 35 peserta. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui perubahan pemahaman peserta terhadap materi yang meliputi pentingnya berserikat, definisi BUMDes, landasan hukum BUMDes, langkah-langkah membangun BUMDes yang sehat, serta peran akuntansi dalam menopang kesuksesan BUMDes.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dan pendampingan mampu meningkatkan pemahaman peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, masih terdapat peserta yang belum memahami secara memadai konsep BUMDes, strategi pengembangan bisnis, serta pentingnya kerja sama usaha dalam meningkatkan pendapatan desa. Setelah kegiatan dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman yang terlihat dari meningkatnya persentase peserta yang berada pada kategori “sangat mengetahui” dan menurunnya peserta yang berada pada kategori “tidak mengetahui sama sekali”. Kondisi ini menunjukkan bahwa metode ceramah interaktif, diskusi, brainstorming, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta.

3.1 Analisis Hasil Pre-Test dan Post-Test

Berdasarkan hasil tanggapan peserta terhadap materi, sebelum kegiatan terdapat 20% peserta yang tidak mengetahui sama sekali materi yang disampaikan, 26% sedikit mengetahui, 30% cukup mengetahui, dan 24% sangat mengetahui. Setelah kegiatan dilaksanakan, peserta yang tidak mengetahui sama sekali menurun menjadi 0%, peserta yang sedikit mengetahui menurun menjadi 5%, peserta yang cukup mengetahui meningkat menjadi 35%, dan peserta yang sangat mengetahui meningkat menjadi 60%. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi peserta mengenai strategi pengembangan bisnis nelayan dan BUMDes. Peningkatan kategori “sangat mengetahui” dari 24% menjadi 60% menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu menerima materi dengan baik. Penurunan kategori “tidak mengetahui sama sekali” dari 20% menjadi 0% juga menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil menjangkau peserta yang sebelumnya belum memiliki pengetahuan awal tentang BUMDes dan strategi pengembangan usaha. Dengan demikian, kegiatan ini dapat dinyatakan berhasil dari aspek peningkatan pemahaman peserta.

Tabel 1. Tanggapan peserta terhadap materi

No	Tanggapan peserta (N=35)	Before	After
1	Tidak mengetahui sama sekali	20%	0
2	Sedikit mengetahui	26%	5%
3	Cukup mengetahui	30%	35%
4	Sangat mengetahui	24%	60%

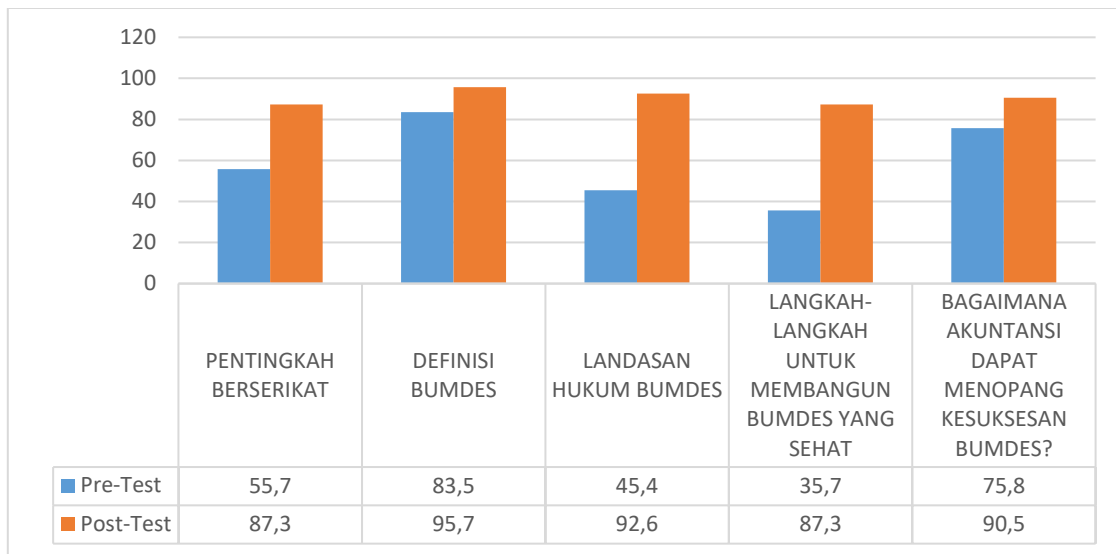
Selain itu, hasil tanggapan peserta terhadap ketertarikan pada strategi pengembangan bisnis dan peningkatan pendapatan desa juga menunjukkan perubahan positif. Sebelum kegiatan, terdapat 10% peserta yang tidak tertarik sama sekali, 15% sedikit tertarik, 35% cukup tertarik, dan 40% sangat tertarik. Setelah kegiatan, kategori tidak tertarik sama sekali dan sedikit tertarik menurun menjadi 0%, sedangkan kategori cukup tertarik meningkat menjadi 40% dan sangat tertarik meningkat menjadi 60%. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mendorong minat peserta untuk menindaklanjuti pengembangan usaha nelayan melalui BUMDes.

Tabel 2. Tanggapan peserta terhadap ketertarikan strategi pengembangan bisnis dan peningkatan desa kaduara timur

No	Tanggapan peserta (N=35)	Before	After
1	Tidak tertarik sama sekali	10%	0
2	Sedikit tertarik	15%	0%
3	Cukup tertarik	35%	40%
4	Sangat tertarik	40%	60%

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Gambar 1. Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Warga Desa Kaduara Timur



Gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan yang diukur dan semuanya mengalami peningkatan. Lebih dari 75% warga desa kaduara timur mengalami peningkatan pengetahuan dan kemampuan melalui pelatihan. Peningkatan pengetahuan mengenai pentingnya berserikat, definisi BUMDes, Landasan hukum BUMDes dan Langkah-langkah untuk membangun BUMDes yang sehat Serta bagaimana akuntansi dapat menopang kesuksesan BUMDes. Bahkan terdapat peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan warga mengenai adanya dan pentingnya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

3.2 Interpretasi Per Indikator Pelatihan

Hasil pengukuran terhadap lima indikator utama menunjukkan bahwa seluruh indikator mengalami peningkatan setelah pelatihan. Indikator pertama, yaitu pentingnya berserikat, meningkat dari skor rata-rata 55,7 pada pre-test menjadi 87,3 pada post-test. Peningkatan ini menunjukkan bahwa peserta mulai memahami pentingnya kerja sama usaha dalam mengembangkan potensi ekonomi nelayan. Sebelum kegiatan, sebagian peserta masih memandang usaha nelayan sebagai aktivitas individual. Setelah kegiatan, peserta mulai memahami bahwa kerja sama melalui BUMDes dapat memperkuat posisi tawar, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan peluang pengembangan usaha bersama.

Indikator kedua, yaitu definisi BUMDes, meningkat dari 83,5 menjadi 95,7. Skor awal pada indikator ini sudah relatif tinggi, yang menunjukkan bahwa sebagian peserta telah mengenal istilah BUMDes. Namun, peningkatan pada post-test menunjukkan bahwa pemahaman peserta menjadi lebih kuat, tidak hanya sebatas mengenal nama BUMDes, tetapi juga memahami fungsi, tujuan, dan manfaat BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Hal ini

sejalan dengan konsep bahwa BUMDes memiliki fungsi untuk mengelola potensi ekonomi desa dan mendukung kesejahteraan masyarakat (UPDESA, n.d.; Amirya, 2024)

Indikator ketiga, yaitu landasan hukum BUMDes, meningkat dari 45,4 menjadi 92,6. Peningkatan ini termasuk signifikan karena sebelum kegiatan peserta belum banyak memahami dasar hukum dan kelembagaan BUMDes. Setelah pelatihan, peserta memperoleh pemahaman bahwa BUMDes memiliki dasar legal yang kuat dalam mendukung pembangunan ekonomi desa. Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak memandang BUMDes hanya sebagai program sementara, tetapi sebagai lembaga resmi desa yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Indikator keempat, yaitu langkah-langkah membangun BUMDes yang sehat, meningkat dari 35,7 menjadi 87,3. Indikator ini menunjukkan peningkatan paling besar dibandingkan indikator lainnya. Hal ini menandakan bahwa sebelum pelatihan, peserta belum memahami secara teknis bagaimana BUMDes dapat dibangun dan dikelola secara sehat. Setelah kegiatan, peserta mulai memahami bahwa BUMDes perlu dikelola melalui perencanaan usaha, pengelolaan sumber daya, pencatatan keuangan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Strategi pengembangan lembaga dan sumber daya menjadi penting karena keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kemampuan dalam menyusun strategi dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan (Juliansyah, 2017).

Indikator kelima, yaitu bagaimana akuntansi dapat menopang kesuksesan BUMDes, meningkat dari 75,8 menjadi 90,5. Peningkatan ini menunjukkan bahwa peserta semakin memahami pentingnya pencatatan keuangan dalam pengelolaan BUMDes. Akuntansi tidak hanya dipahami sebagai pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pandangan Rajafi dan Irianto (2007) bahwa akuntansi dapat mendukung pertanggungjawaban dan transparansi dalam aktivitas organisasi.

3.3 Pembahasan Berbasis Literatur

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat terhadap BUMDes menjadi langkah awal yang penting dalam penguatan ekonomi desa. BUMDes dapat berperan sebagai lembaga ekonomi yang menghubungkan potensi lokal dengan aktivitas usaha masyarakat. Ismowati, Fadhila, dan Firmansyah (2022) menjelaskan bahwa BUMDes dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa apabila dikelola secara efektif. Dengan demikian, peningkatan pemahaman peserta mengenai BUMDes menjadi dasar penting bagi pengembangan usaha nelayan di Desa Kaduara Timur.

Hasil kegiatan ini juga mendukung pandangan Susanto dan Winarno (2020) bahwa BUMDes memiliki peran dalam meningkatkan ekonomi pedesaan melalui tata kelola yang baik, program usaha yang sesuai dengan potensi lokal, serta dukungan kelembagaan yang kuat. Dalam konteks Desa Kaduara Timur, potensi perikanan tangkap tradisional dapat dikembangkan melalui BUMDes agar tidak hanya berhenti pada aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga diarahkan pada pengolahan produk, pemasaran, dan peningkatan nilai tambah.

Selain itu, Food and Agriculture Organization (2020) menjelaskan bahwa sektor perikanan memiliki peran penting dalam mendukung penghidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pengembangan bisnis nelayan melalui BUMDes dapat menjadi strategi yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kurniawati (2017) juga menegaskan bahwa pendapatan keluarga nelayan dapat diperkuat melalui peran rumah tangga, termasuk pengolahan hasil perikanan. Hal ini sesuai dengan kondisi Desa Kaduara Timur, di mana sebagian ibu rumah tangga memiliki potensi dalam mengolah produk berbasis ikan.

3.4 Dampak Praktis bagi Mitra

Dampak praktis dari kegiatan ini terlihat dari meningkatnya pemahaman peserta mengenai pentingnya BUMDes sebagai wadah pengembangan usaha nelayan. Peserta mulai memahami bahwa BUMDes dapat menjadi lembaga yang memfasilitasi kerja sama usaha, pengelolaan hasil perikanan, pemasaran produk, pencatatan keuangan, dan pengawasan usaha. Hal ini penting karena selama ini sebagian usaha nelayan masih berjalan secara individual dan belum terintegrasi dalam model bisnis bersama.

Kegiatan ini juga memberikan manfaat praktis bagi pengelola atau calon pengelola BUMDes karena mereka memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pencatatan keuangan sederhana. Melalui pencatatan keuangan,

BUMDes dapat mengetahui pemasukan, pengeluaran, keuntungan, dan perkembangan usaha secara lebih jelas. Selain itu, pencatatan yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes karena pengelolaan usaha menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Bagi nelayan dan pelaku usaha rumah tangga berbasis hasil perikanan, kegiatan ini memberikan wawasan bahwa pengembangan usaha tidak hanya dilakukan melalui peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga melalui penguatan kerja sama, pengolahan produk, pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, peserta memperoleh gambaran bahwa potensi perikanan desa dapat diarahkan menjadi sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan.

3.5 Hasil Brainstorming dan Diskusi Peserta

Hasil brainstorming menunjukkan bahwa peserta memiliki beberapa kendala dalam mengembangkan usaha berbasis perikanan. Kendala utama yang muncul adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai peran BUMDes, belum optimalnya pengelolaan hasil perikanan, keterbatasan akses pasar, serta belum adanya pencatatan keuangan yang tertata. Sebagian peserta juga menyampaikan bahwa hasil tangkapan ikan umumnya masih dijual secara langsung, sehingga nilai tambah produk belum maksimal.

Diskusi juga menunjukkan adanya peluang pengembangan usaha berbasis hasil perikanan melalui BUMDes. Beberapa peluang yang muncul antara lain pengolahan ikan menjadi produk bernilai tambah, pemasaran produk lokal melalui BUMDes, kerja sama antara nelayan dan pelaku usaha rumah tangga, serta penyusunan pencatatan sederhana untuk mengetahui hasil usaha. Peserta juga menunjukkan ketertarikan untuk memahami lebih lanjut bagaimana BUMDes dapat dikelola secara sehat dan transparan.

Selain itu, peserta menyampaikan bahwa pengawasan menjadi aspek penting agar masyarakat percaya terhadap pengelolaan BUMDes. Kepercayaan masyarakat menjadi modal penting dalam membangun kerja sama usaha. Oleh karena itu, BUMDes perlu memiliki sistem pencatatan, pelaporan, dan pengawasan yang sederhana tetapi konsisten.

3.6 Keterkaitan Hasil dengan Peningkatan Pendapatan Desa

Peningkatan pemahaman peserta terhadap strategi pengembangan bisnis nelayan melalui BUMDes memiliki keterkaitan langsung dengan potensi peningkatan pendapatan desa. Ketika masyarakat memahami fungsi BUMDes, pentingnya kerja sama usaha, serta perlunya pencatatan dan pengawasan, maka peluang untuk mengembangkan unit usaha desa menjadi lebih besar. Unit usaha yang dikelola melalui BUMDes dapat membantu meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, memperluas pemasaran produk, serta menciptakan sumber pendapatan baru bagi desa.

Dalam jangka panjang, BUMDes yang dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa. Kontribusi tersebut dapat berasal dari keuntungan unit usaha, pengelolaan produk unggulan desa, serta kerja sama usaha dengan masyarakat. Dengan demikian, hasil kegiatan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga menjadi dasar awal bagi pengembangan model bisnis nelayan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Keterkaitan antara strategi bisnis, akuntansi, pengawasan, dan pendapatan desa dapat dijelaskan secara berurutan. Strategi bisnis membantu BUMDes menentukan jenis usaha yang sesuai dengan potensi perikanan desa. Akuntansi membantu mencatat dan mengukur kinerja usaha. Pengawasan memastikan kegiatan usaha berjalan transparan dan sesuai tujuan. Apabila ketiga aspek tersebut berjalan dengan baik, maka BUMDes memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa.

3.7 Keterbatasan Kegiatan

Meskipun kegiatan ini menunjukkan hasil positif, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, kegiatan masih berfokus pada peningkatan pemahaman dan belum sampai pada implementasi penuh unit usaha BUMDes berbasis perikanan. Kedua, evaluasi kegiatan masih terbatas pada hasil pre-test, post-test, kuesioner, dan diskusi, sehingga belum mengukur dampak ekonomi secara langsung terhadap peningkatan pendapatan nelayan atau pendapatan desa. Ketiga, kegiatan dilakukan dalam waktu terbatas, sehingga

pendampingan teknis mengenai penyusunan rencana bisnis, pencatatan keuangan, dan mekanisme pengawasan BUMDes masih perlu dilanjutkan. Keempat, hasil kegiatan masih bergantung pada komitmen masyarakat, pengelola BUMDes, dan pemerintah desa dalam menindaklanjuti materi yang telah diberikan. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pendampingan lanjutan agar peningkatan pemahaman dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

3.8 Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil kegiatan dan diskusi peserta, terdapat beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan.

1. Perlu dilakukan pendampingan penyusunan rencana bisnis sederhana bagi BUMDes berbasis potensi perikanan Desa Kaduara Timur. Rencana bisnis ini dapat mencakup jenis produk yang akan dikembangkan, sasaran pasar, kebutuhan modal, mekanisme kerja sama, serta pembagian peran antara nelayan, pelaku usaha rumah tangga, dan BUMDes.
2. Perlu dilakukan pelatihan lanjutan mengenai pencatatan keuangan sederhana bagi pengelola BUMDes dan pelaku usaha masyarakat. Pelatihan ini penting agar setiap transaksi usaha dapat dicatat dengan baik dan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan sederhana.
3. Perlu disusun mekanisme pengawasan internal BUMDes agar pengelolaan usaha berjalan transparan, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat.
4. Perlu dilakukan pemetaan produk unggulan berbasis hasil perikanan yang dapat dikembangkan oleh BUMDes. Produk tersebut dapat diarahkan pada pengolahan hasil ikan agar memiliki nilai tambah dan daya saing.
5. Pemerintah desa dan pengelola BUMDes perlu memperkuat partisipasi masyarakat agar BUMDes benar-benar menjadi lembaga ekonomi bersama, bukan hanya lembaga administratif desa.

Dengan demikian, hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat mengenai BUMDes, strategi bisnis nelayan, akuntansi, dan pengawasan merupakan langkah awal yang penting dalam mendorong peningkatan pendapatan desa. Kegiatan ini perlu dilanjutkan melalui pendampingan teknis agar hasil edukasi dapat berkembang menjadi praktik pengelolaan usaha desa yang lebih produktif, transparan, dan berkelanjutan.

3.9 Model Operasional Pengembangan Bisnis Nelayan Berbasis BUMDes

Pengembangan bisnis nelayan melalui optimalisasi BUMDes tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan pemahaman masyarakat, tetapi perlu diarahkan pada pembentukan model operasional yang jelas, sederhana, dan dapat dijalankan secara bertahap. Model operasional ini penting agar BUMDes tidak hanya dipahami sebagai lembaga ekonomi desa secara konseptual, tetapi juga mampu berfungsi sebagai penggerak kegiatan usaha yang nyata bagi nelayan dan pelaku usaha rumah tangga berbasis hasil perikanan.

Dalam konteks Desa Kaduara Timur, model operasional BUMDes dapat diarahkan pada tiga fungsi utama, yaitu fungsi pengumpulan hasil perikanan, fungsi pengolahan produk, dan fungsi pemasaran. Fungsi pengumpulan hasil perikanan dilakukan dengan cara menjadikan BUMDes sebagai lembaga yang membantu mengoordinasikan hasil tangkapan nelayan agar tidak sepenuhnya bergantung pada penjualan individual. Selama ini, salah satu kendala yang dihadapi nelayan adalah lemahnya posisi tawar karena hasil tangkapan dijual secara langsung dalam kondisi mentah dan dalam skala kecil. Melalui BUMDes, hasil tangkapan dapat dikelola secara lebih terkoordinasi sehingga memiliki volume usaha yang lebih besar dan peluang negosiasi harga yang lebih baik.

Fungsi kedua adalah pengolahan produk hasil perikanan. BUMDes dapat mendorong masyarakat, khususnya rumah tangga nelayan, untuk mengembangkan produk olahan berbasis ikan. Produk tersebut dapat berupa ikan kering, abon ikan, kerupuk ikan, ikan asap, atau produk olahan lain yang sesuai dengan potensi lokal dan kemampuan masyarakat. Pengolahan produk menjadi penting karena nilai ekonomi ikan mentah cenderung lebih rendah dibandingkan produk olahan yang memiliki daya simpan lebih lama, kemasan lebih menarik, dan sasaran pasar yang lebih luas. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya berperan dalam menjual hasil tangkapan, tetapi juga membantu meningkatkan nilai tambah produk perikanan desa.

Fungsi ketiga adalah pemasaran. BUMDes dapat menjadi penghubung antara nelayan, pelaku usaha rumah tangga, dan pasar. Pemasaran dapat dilakukan melalui pasar lokal, kerja sama dengan toko, warung, koperasi, pasar desa,

maupun media digital sederhana seperti WhatsApp Business, Facebook Marketplace, dan katalog produk berbasis media sosial. Strategi pemasaran ini dapat membantu produk hasil perikanan Desa Kaduara Timur dikenal lebih luas dan tidak hanya bergantung pada pembeli langsung di sekitar desa.

Model operasional tersebut dapat dijalankan secara bertahap. Pada tahap awal, BUMDes dapat memulai dari kegiatan paling sederhana, yaitu pendataan nelayan, pendataan hasil tangkapan, dan identifikasi produk yang paling potensial untuk dikembangkan. Tahap berikutnya adalah pembentukan kelompok kecil usaha pengolahan hasil perikanan yang bekerja sama dengan BUMDes. Setelah itu, BUMDes dapat mulai menyusun sistem pencatatan transaksi, pembagian hasil, pengawasan, dan pemasaran. Dengan tahapan tersebut, pengembangan bisnis nelayan tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang realistis sesuai dengan kapasitas masyarakat desa.

Model operasional ini juga sejalan dengan prinsip syirkah yang telah diperkenalkan dalam kegiatan pengabdian. Dalam model ini, nelayan, pelaku usaha pengolahan, dan BUMDes dapat bekerja sama berdasarkan pembagian peran, pembagian keuntungan, dan pembagian risiko yang disepakati bersama. Nelayan berperan sebagai penyedia bahan baku, pelaku usaha rumah tangga berperan dalam pengolahan produk, sedangkan BUMDes berperan dalam koordinasi, pencatatan, pemasaran, dan pengawasan. Dengan pembagian peran yang jelas, kerja sama usaha dapat berjalan lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

3.10 Penguatan Rantai Nilai Produk Perikanan

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bisnis nelayan adalah penguatan rantai nilai produk perikanan. Rantai nilai menggambarkan proses perubahan hasil tangkapan ikan dari tahap produksi awal hingga menjadi produk yang diterima oleh konsumen. Dalam konteks nelayan Desa Kaduara Timur, rantai nilai masih perlu diperkuat karena sebagian hasil perikanan masih dijual secara langsung tanpa proses pengolahan lebih lanjut. Kondisi ini menyebabkan nilai ekonomi yang diterima masyarakat belum optimal. Rantai nilai produk perikanan dapat dimulai dari tahap penangkapan ikan, pengumpulan hasil tangkapan, pemilahan kualitas, pengolahan, pengemasan, pemasaran, hingga penjualan. Pada tahap penangkapan, nelayan menghasilkan bahan baku utama berupa ikan segar. Namun, apabila ikan langsung dijual tanpa pengolahan, maka nilai jualnya sangat bergantung pada kondisi pasar harian, musim tangkapan, dan keberadaan pembeli. Pada saat hasil tangkapan melimpah, harga ikan dapat menurun karena pasokan meningkat. Oleh karena itu, pengolahan hasil perikanan menjadi strategi penting untuk menjaga nilai ekonomi produk.

Pada tahap pengolahan, masyarakat dapat mengubah ikan segar menjadi produk yang memiliki daya simpan lebih panjang dan nilai jual lebih tinggi. Produk olahan juga dapat membantu mengurangi risiko kerugian akibat ikan tidak terjual dalam kondisi segar. Misalnya, ikan yang tidak langsung habis terjual dapat diolah menjadi produk kering, abon, kerupuk, atau produk siap konsumsi lainnya. Dengan demikian, pengolahan hasil perikanan dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketergantungan nelayan terhadap penjualan ikan mentah.

Tahap berikutnya adalah pengemasan. Pengemasan memiliki peran penting dalam meningkatkan daya tarik produk. Produk olahan yang dikemas secara sederhana tetapi bersih, rapi, dan memiliki identitas desa akan lebih mudah dipasarkan. BUMDes dapat membantu masyarakat dalam membuat merek produk, label sederhana, informasi komposisi, tanggal produksi, dan kontak pemesanan. Meskipun masih dalam skala kecil, pengemasan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat citra produk lokal.

Selanjutnya, tahap pemasaran menjadi bagian yang sangat menentukan keberhasilan pengembangan bisnis nelayan. Pemasaran tidak hanya dilakukan dengan menjual produk di lingkungan desa, tetapi juga dapat diperluas ke pasar kecamatan, pasar kabupaten, toko oleh-oleh, koperasi, lembaga pendidikan, maupun platform digital sederhana. BUMDes dapat berperan sebagai pusat promosi produk desa. Dengan demikian, produk perikanan Desa Kaduara Timur tidak hanya menjadi komoditas mentah, tetapi dapat berkembang menjadi produk unggulan desa yang memiliki identitas dan nilai ekonomi lebih tinggi.

Penguatan rantai nilai ini juga berpotensi meningkatkan pendapatan desa. Apabila BUMDes mampu mengelola sebagian aktivitas rantai nilai, maka desa dapat memperoleh sumber pendapatan dari margin usaha, jasa pemasaran, kerja sama produksi, atau unit usaha pengolahan. Pada saat yang sama, masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi karena hasil tangkapan dan produk olahan mereka memiliki akses pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, penguatan rantai nilai perlu menjadi agenda lanjutan setelah kegiatan edukasi dan pendampingan awal.

3.11 Tata Kelola, Pembagian Peran, dan Mekanisme Pengawasan BUMDes

Keberhasilan pengembangan bisnis nelayan melalui BUMDes sangat bergantung pada kualitas tata kelola. BUMDes yang sehat tidak hanya ditentukan oleh adanya peluang usaha, tetapi juga oleh kejelasan struktur organisasi, pembagian peran, sistem pencatatan, mekanisme pelaporan, dan pengawasan. Tanpa tata kelola yang baik, usaha desa berpotensi menghadapi masalah kepercayaan, konflik kepentingan, ketidakteraturan pencatatan, dan lemahnya akuntabilitas.

Dalam pengembangan bisnis nelayan, pembagian peran perlu disusun secara jelas. Pemerintah desa dapat berperan sebagai pembina dan fasilitator kebijakan. Pengelola BUMDes berperan sebagai pelaksana kegiatan usaha, pengelola administrasi, pencatat transaksi, dan penghubung pasar. Nelayan berperan sebagai penyedia hasil tangkapan atau bahan baku utama. Pelaku usaha rumah tangga dapat berperan sebagai pengolah produk hasil perikanan. Sementara itu, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas sosial yang ikut memastikan bahwa BUMDes dikelola secara terbuka dan memberi manfaat bagi kepentingan bersama.

Mekanisme pengawasan perlu dibuat sederhana agar dapat diterapkan oleh pengelola BUMDes dan dipahami oleh masyarakat. Pengawasan dapat dilakukan melalui pencatatan transaksi harian, laporan kas masuk dan kas keluar, laporan persediaan produk, laporan penjualan, serta laporan laba sederhana. Laporan tersebut tidak harus kompleks, tetapi harus konsisten, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pencatatan yang baik, masyarakat dapat mengetahui perkembangan usaha BUMDes secara lebih transparan.

Selain pencatatan, BUMDes juga perlu memiliki forum evaluasi berkala. Forum ini dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan untuk membahas perkembangan usaha, kendala, keuntungan, kebutuhan modal, serta rencana pengembangan berikutnya. Forum evaluasi juga dapat menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan BUMDes. Semakin terbuka pengelolaan BUMDes, semakin besar peluang masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan usaha bersama.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting karena BUMDes mengelola potensi ekonomi desa yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Transparansi berarti informasi mengenai kegiatan usaha, keuangan, dan pembagian hasil dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas berarti pengelola BUMDes mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan, transaksi, dan hasil usaha yang dikelola. Kedua prinsip ini perlu ditanamkan sejak awal agar BUMDes tidak hanya menjadi lembaga usaha, tetapi juga menjadi lembaga ekonomi desa yang dipercaya masyarakat.

Dalam konteks pengabdian ini, peningkatan pemahaman peserta mengenai akuntansi dan pengawasan menjadi modal awal untuk memperbaiki tata kelola BUMDes. Namun, pemahaman tersebut perlu dilanjutkan dengan pelatihan teknis yang lebih praktis. Misalnya, pelatihan membuat buku kas sederhana, laporan penjualan harian, rekap pembelian bahan baku, rekap produksi, laporan stok barang, dan laporan keuntungan. Dengan keterampilan tersebut, pengelola BUMDes dan masyarakat dapat mulai membangun sistem tata kelola yang lebih tertib.

3.12 Strategi Pemasaran dan Digitalisasi Sederhana Produk Nelayan

Strategi pemasaran menjadi bagian penting yang belum sepenuhnya dibahas dalam pengembangan bisnis nelayan melalui BUMDes. Pemasaran tidak hanya berfungsi untuk menjual produk, tetapi juga untuk membangun identitas produk desa, memperluas jaringan konsumen, dan meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan. Tanpa pemasaran yang baik, produk yang dihasilkan masyarakat akan sulit berkembang meskipun memiliki kualitas yang cukup baik.

Pada tahap awal, strategi pemasaran dapat dilakukan dengan pendekatan sederhana dan sesuai kemampuan masyarakat. BUMDes dapat membantu membuat identitas produk, seperti nama merek, logo sederhana, label kemasan, dan narasi keunggulan produk. Identitas produk penting agar hasil olahan perikanan Desa Kaduara Timur memiliki ciri khas dan mudah dikenali oleh konsumen. Produk tidak hanya dijual sebagai makanan biasa, tetapi juga sebagai produk lokal desa yang memiliki nilai ekonomi dan sosial.

Pemasaran juga dapat dilakukan melalui jaringan lokal. BUMDes dapat menjalin kerja sama dengan warung, toko kelontong, pasar desa, koperasi, sekolah, pesantren, kantor desa, maupun kegiatan masyarakat. Jaringan lokal ini

menjadi pasar awal yang realistis karena dekat dengan lokasi produksi dan tidak membutuhkan biaya distribusi yang besar. Setelah pasar lokal mulai terbentuk, pemasaran dapat diperluas ke wilayah kecamatan atau kabupaten.

Selain pemasaran konvensional, digitalisasi sederhana juga perlu mulai diperkenalkan. Digitalisasi yang dimaksud tidak harus menggunakan sistem yang rumit, tetapi dapat dimulai dari penggunaan media sosial dan aplikasi komunikasi yang sudah akrab bagi masyarakat. Misalnya, BUMDes dapat membuat katalog produk melalui WhatsApp Business, mempromosikan produk melalui status WhatsApp, Facebook, Instagram, atau grup komunitas lokal. Foto produk yang menarik, informasi harga, nomor pemesanan, dan testimoni konsumen dapat membantu meningkatkan minat pembeli.

Digitalisasi sederhana juga dapat membantu BUMDes dalam pencatatan pesanan. Pesanan yang masuk melalui WhatsApp atau media sosial dapat dicatat dalam buku pesanan atau spreadsheet sederhana. Dengan cara ini, BUMDes dapat mengetahui jumlah permintaan, jenis produk yang paling diminati, waktu penjualan yang ramai, serta kebutuhan produksi berikutnya. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan usaha yang lebih tepat.

Strategi pemasaran perlu disusun secara bertahap. Tahap pertama adalah mengenalkan produk kepada masyarakat sekitar. Tahap kedua adalah memperkuat kualitas dan kemasan produk. Tahap ketiga adalah memperluas jaringan penjualan. Tahap keempat adalah memanfaatkan media digital untuk promosi dan pemesanan. Dengan strategi bertahap ini, masyarakat tidak merasa terbebani, tetapi tetap dapat bergerak menuju pengelolaan usaha yang lebih modern.

Melalui pemasaran dan digitalisasi sederhana, BUMDes dapat membantu nelayan dan pelaku usaha rumah tangga meningkatkan daya saing produk perikanan. Hasil tangkapan nelayan tidak lagi hanya dipandang sebagai komoditas mentah, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk lokal yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Dengan demikian, strategi pemasaran menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa.

3.13 Manajemen Risiko dan Keberlanjutan Program

Pengembangan bisnis nelayan melalui BUMDes juga perlu mempertimbangkan aspek manajemen risiko. Usaha berbasis perikanan memiliki beberapa risiko, antara lain risiko musim, risiko cuaca, risiko fluktuasi hasil tangkapan, risiko harga, risiko kualitas produk, risiko pemasaran, dan risiko pengelolaan keuangan. Apabila risiko-risiko tersebut tidak diantisipasi, maka unit usaha BUMDes dapat mengalami kendala dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Risiko musim dan cuaca merupakan risiko yang umum dihadapi nelayan. Pada musim tertentu, hasil tangkapan dapat menurun sehingga pasokan bahan baku berkurang. Sebaliknya, pada saat hasil tangkapan melimpah, harga ikan dapat turun karena pasokan terlalu banyak. BUMDes perlu memahami pola ini agar dapat menyusun strategi usaha yang lebih adaptif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengembangkan produk olahan yang memiliki daya simpan lebih lama, sehingga hasil tangkapan tidak harus segera dijual dalam kondisi mentah.

Risiko harga juga perlu diperhatikan. Harga ikan dapat berubah karena kondisi pasar, jumlah pasokan, kualitas ikan, dan keberadaan pembeli. Jika nelayan menjual secara individual, posisi tawar mereka cenderung lebih lemah. Melalui BUMDes, penjualan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi sehingga memiliki peluang untuk memperoleh harga yang lebih baik. Selain itu, pengolahan produk juga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap harga ikan mentah.

Risiko kualitas produk perlu dikelola melalui proses produksi yang bersih, pengemasan yang baik, dan penyimpanan yang sesuai. Produk olahan perikanan harus memperhatikan kebersihan bahan baku, alat produksi, tempat pengolahan, serta kemasan. Apabila kualitas produk tidak dijaga, maka kepercayaan konsumen dapat menurun. Oleh karena itu, pelatihan lanjutan mengenai standar produksi sederhana dan kebersihan produk menjadi penting untuk mendukung keberlanjutan usaha.

Risiko keuangan juga menjadi perhatian utama dalam pengelolaan BUMDes. Usaha desa dapat mengalami masalah apabila transaksi tidak dicatat dengan baik, biaya produksi tidak dihitung, atau keuntungan tidak dipisahkan dari modal. Oleh karena itu, pencatatan keuangan sederhana harus menjadi bagian dari sistem kerja

BUMDes. Setiap pemasukan, pengeluaran, pembelian bahan baku, biaya produksi, hasil penjualan, dan pembagian keuntungan perlu dicatat secara tertib.

Keberlanjutan program juga sangat bergantung pada komitmen masyarakat dan pemerintah desa. Kegiatan pengabdian ini telah meningkatkan pemahaman peserta, tetapi hasil tersebut perlu ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Tindak lanjut dapat berupa pembentukan kelompok kerja kecil, penyusunan rencana bisnis sederhana, penentuan produk prioritas, pelatihan pencatatan keuangan, serta pendampingan pemasaran. Tanpa tindak lanjut, peningkatan pemahaman berisiko tidak berkembang menjadi perubahan ekonomi yang nyata.

Dengan demikian, manajemen risiko dan keberlanjutan program menjadi bagian penting dalam pengembangan bisnis nelayan melalui BUMDes. BUMDes perlu dikelola secara hati-hati, transparan, dan bertahap agar mampu menghadapi risiko usaha. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari peningkatan pemahaman peserta, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dan pengelola BUMDes dalam menerapkan pengetahuan tersebut ke dalam praktik usaha yang produktif dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai strategi pengembangan bisnis nelayan melalui optimalisasi BUMDes di Desa Kaduara Timur menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan usaha nelayan secara kolektif, terarah, dan berbasis kelembagaan desa. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya berserikat, fungsi BUMDes, landasan hukum BUMDes, langkah-langkah membangun BUMDes yang sehat, serta peran akuntansi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha desa. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan potensi perikanan sebagai sumber peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator yang diukur. Pemahaman mengenai pentingnya berserikat meningkat dari 55,7 menjadi 87,3; pemahaman definisi BUMDes meningkat dari 83,5 menjadi 95,7; pemahaman landasan hukum BUMDes meningkat dari 45,4 menjadi 92,6; pemahaman mengenai langkah-langkah membangun BUMDes yang sehat meningkat dari 35,7 menjadi 87,3; serta pemahaman mengenai peran akuntansi dalam menopang kesuksesan BUMDes meningkat dari 75,8 menjadi 90,5. Selain itu, ketertarikan peserta terhadap strategi pengembangan bisnis nelayan dan peningkatan pendapatan desa juga mengalami peningkatan, yang terlihat dari naiknya kategori "sangat tertarik" menjadi 60% setelah kegiatan dilaksanakan. Dengan demikian, kegiatan ini dapat disimpulkan efektif dalam meningkatkan literasi masyarakat nelayan mengenai strategi pengembangan bisnis berbasis BUMDes. Optimalisasi BUMDes berpotensi menjadi wadah kerja sama usaha, pengelolaan hasil perikanan, peningkatan nilai tambah produk, pencatatan keuangan, serta pengawasan usaha yang lebih transparan dan akuntabel. Model kerja sama berbasis syirkah juga relevan diterapkan karena menekankan prinsip kebersamaan, pembagian keuntungan, dan pembagian risiko secara adil. Sebagai tindak lanjut, diperlukan pendampingan teknis yang lebih berkelanjutan, terutama dalam penyusunan rencana bisnis sederhana, pencatatan keuangan BUMDes, pemetaan produk unggulan hasil perikanan, penguatan pemasaran, dan penyusunan mekanisme pengawasan internal. Pendampingan lanjutan ini penting agar peningkatan pemahaman masyarakat tidak berhenti pada aspek pengetahuan, tetapi dapat diwujudkan dalam praktik pengelolaan usaha desa yang produktif, transparan, dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta pendapatan Desa Kaduara Timur secara berkelanjutan.

Referensi

1. Accurate., Mengenal Syirkah: Sistem Kerja Sama Bisnis Islami (accurate.id)
2. Artikel UPDESA.COM "Apa itu BUMDes? Fungsi, Tujuan, dan Manfaatnya" <https://updesa.com/bumdes/>
3. Fauzi, S. Pengembangan Usaha Kuliner Yang Menjadi Kebutuhan Primer Masyarakat Indonesia. Kewirausahaan.
4. Ismowati, M., Fadhila, E., & Firmansyah, V. Z. (2022). Peran Bumdes dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa di Desa Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL, 1(8), 853-864.
5. Kurniawati, A. (2017). Peran istri nelayan dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga. Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim, (1), 77-88.
6. Juliansyah, E. (2017). Strategi pengembangan sumber daya perusahaan dalam meningkatkan kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi. Jurnal Ekonomak, 3(2), 19-37.
7. Mirna Amiry "PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa" <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/21> (accessed Aug. 17, 2024)
8. Rajafi, L. R., dan G. Irianto. 2007. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (Studi pada Bursa Efek Jakarta). Tema 8(1):56-75.

9. Utang Suwaryo (2011) "MENGEMBALIKAN OTONOMI UNTUK DESA"
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1382747&val=1237&title=MENGEMBALIKAN%20OTONOMI%20UNTUK%20DESA> (accessed Aug. 19, 2024)
10. Susanto, H., & Winarno, B. (2020). The role of village-owned enterprises (BUMDes) in improving rural economy. *Journal of Rural Development*, 39(2), 145–160. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.303938>
11. Food and Agriculture Organization. (2020). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2020*. Rome: FAO. <https://doi.org/10.4060/ca9229en>
12. World Bank. (2020). *Enhancing the Role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Indonesia*. Washington, DC: World Bank.
13. Arsyad, L. (2016). *Ekonomi pembangunan (Edisi 5)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
14. Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
15. Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
16. Handayani, S., & Suharto, D. G. (2020). *Pedoman tata kelola BUMDes: Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia.
17. Zakariya, A. F. (2020). Pemberdayaan nelayan dalam membangun kekuatan ekonomi melalui pengolahan ikan di Desa Karangagung. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(2), 133–150.
18. Effendi, I., & Sari, N. (2022). Pemberdayaan masyarakat pengolah ikan dalam mengoptimalkan usaha olahan ikan sebagai sumber pendapatan. *Open Community Service Journal*, 1(2), 55–63.